

**SALINAN**

**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu Tahun 2024-2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Kabupaten Pringsewu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 40 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 330);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024-2026.**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran tiap tahun yang jelas.
7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam 3 (tiga) Tahun mendatang.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen pembangunan menengah daerah yang digunakan oleh Pejabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman rencana kerja bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Tahun 2024-2026.

### Pasal 3

*Road Map* Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah agar menciptakan Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing dan peningkatan kualitas pelayanan dan bebas KKN.

## BAB III ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

### Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu Tahun 2024-2026 merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design Reformasi Birokrasi* dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) Tahun yaitu Tahun 2024-2026.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu Tahun 2024-2026 digunakan sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di internal instansi serta menjalankan Program Mikro.

## BAB IV SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

### Pasal 5

- (1) Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

#### RINGKASAN EKSEKUTIF

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika Penyusunan *Road Map*

## BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

- A. Kondisi Eksisting sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2024-2026
- B. Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu
- C. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu
- D. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu

## BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

- A. Penetapan dan Sasaran Reformasi Birokrasi
- B. Perencanaan Reformasi Birokrasi General
- C. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

## BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

- A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- B. Mekanisme dan Monitoring Evaluasi Reformasi Birokrasi

## BAB V PENUTUP

- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2018-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 330) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 22 Maret 2024

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

**dto**

**MARINDO KURNIAWAN**

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 22 Maret 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,**

**dto**

**HERI ISWAHYUDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024 NOMOR 690**

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,



A. Gundilang

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024-2026.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Birokrasi menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Pada akhir periode *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat sehingga perlu dilakukan penajaman. Upaya yang dilakukan terkait pelaksanaan RB pada level mikro mengarahkan penajaman pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yaitu RB *General* dan RB Tematik.

Dalam membangun RB *General*, Sesuai dengan penetapan kinerja utama yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Refromasi Birokrasi 2020-2024, terdapat 21 (dua puluh satu) Kinerja Utama yang wajib ada di dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi. Kabupaten Pringsewu kemudian menetapkan 17 (tujuh belas) Kinerja Utama yang menjadi prioritas untuk tahun 2023 dan 4 (empat) Kinerja Utama di Tahun 2024. Kegiatan Utama dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

Prioritas Kinerja Utama Tahun 2024:

1. Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile);
2. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional;
3. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi;
4. Pembangunan Zona Integritas di unit kerja;
5. Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi;
7. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
8. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;

9. Pelaksanaan Arsip Digital;
10. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
12. Penataan Jabatan Fungsional;
13. Penguatan Manajemen Talenta ASN;
14. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN;
15. Penguatan Sistem Merit;
16. Pelaksanaan *Core Values* ASN; dan
17. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima.

Prioritas Kinerja Utama Tahun 2025:

1. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN;
2. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital;
3. Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik;
4. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral;

Dari hasil Penetapan Prioritas Kegiatan Utama, Pemerintah Kabupaten Pringsewu kemudian menetapkan seluruh Target Kegiatan Utama tersebut, yang diharapkan ditahun 2025 seluruh Target Kegiatan Utama dapat tercapai.

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB Nasional 2020-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yaitu:

1. Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan Stunting);
4. Percepatan Aktualitas Presiden (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pengendalian Inflasi.

Dari keempat tema tersebut, Pemerintah Kabupaten Pringsewu menentukan tema yang dipilih yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan Stunting);
4. Percepatan Prioritas Aktualitas Presiden:
  - a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
  - b. Pengendalian Inflasi.

Pada akhirnya, *Road Map* RB Kabupaten Pringsewu ini diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan RB Nasional guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing, serta mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tangkas, tanggap, tepat, profesional dan bersih dari praktik KKN.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kondisi *New Normal* (adaptasi baru) saat ini menuntut kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baru dalam beraktivitas begitu juga dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Pandemi Covid-19 menjadi katalis kemajuan teknologi dan mentransformasi pelayanan publik dilakukan secara digital. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas, mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih responsif dan adaptif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah juga diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata dan memenuhi rasa keadilan.

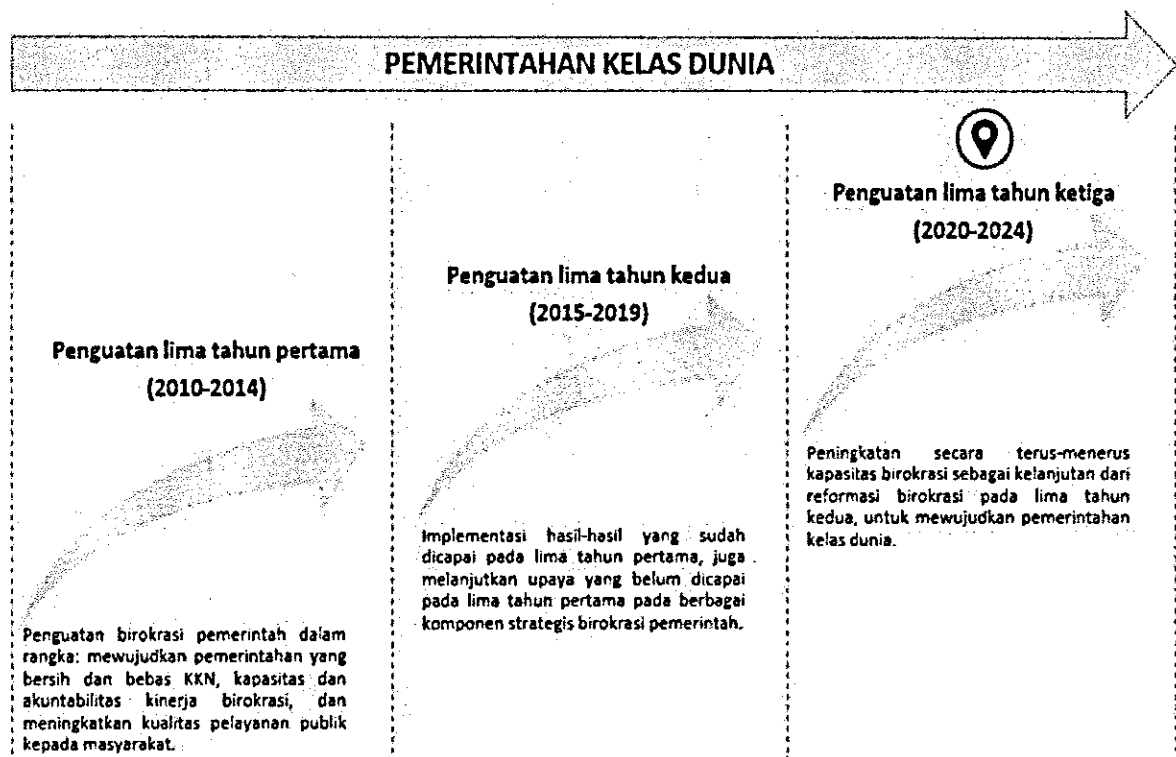
Pemerintahan yang efisien dan akuntabel dalam penggunaan sumber daya, baik sumber daya aparatur maupun anggaran, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi setiap pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance*. *Good Governance* dikenal sebagai paradigma yang menarik, dengan prinsip pada penekanan terhadap keterlibatan seluruh elemen, baik yang berada dalam birokrasi maupun yang berada diluar birokrasi. Dalam paradigmanya terlihat adanya pergeseran dari *rule government* ke *good government* (Ryaas Rasyid; 1998), yakni proses pemerintahan tidak lagi semata-mata menyandarkan pada aspek peraturan dan perundang-undangan, akan tetapi lebih menekankan kepada partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat bukan lagi sebagai objek, tetapi menjadi subjek pembangunan. Agar terjadi efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintah daerah harus memiliki tata kelola sumber daya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai selama masa pemerintahan. Sehingga perlu dilakukan penetapan prioritas-prioritas kebijakan yang bertujuan agar alokasi sumberdaya dapat difokuskan pada prioritas tertentu dan berdampak secara meluas bagi kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional (*good governance*) diyakini mampu menjadi titik ungit kinerja pada organisasi. Dimensi tata kelola pemerintahan dimaksud dapat dipahami secara lebih mikro seperti sistem manajemen sumber daya manusia, sistem pemerintahan berbasis elektronik, sistem keuangan daerah, dan lain sebagainya yang dapat dimaknai sebagai unsur dari tata kelola pemerintahan. Berbagai sistem tata kelola tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi sehingga pengelolaannya memerlukan sistem yang terintegrasi.

*Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Adanya *Road Map* Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk mencapai tujuan pelaksanaan dan perbaikan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu Tahun 2024-2026 merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Secara teknis, penyusunan *Road Map* mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Untuk Substansi area perubahan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Substansi Reformasi Birokrasi dicanangkan secara legal formal dalam *grand design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025, yang terbagi dalam tiga periode, yaitu: (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2014, (2) *Road Map* RB Tahun 2015-2019 dan (3) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1  
Grand Design Reformasi Birokrasi



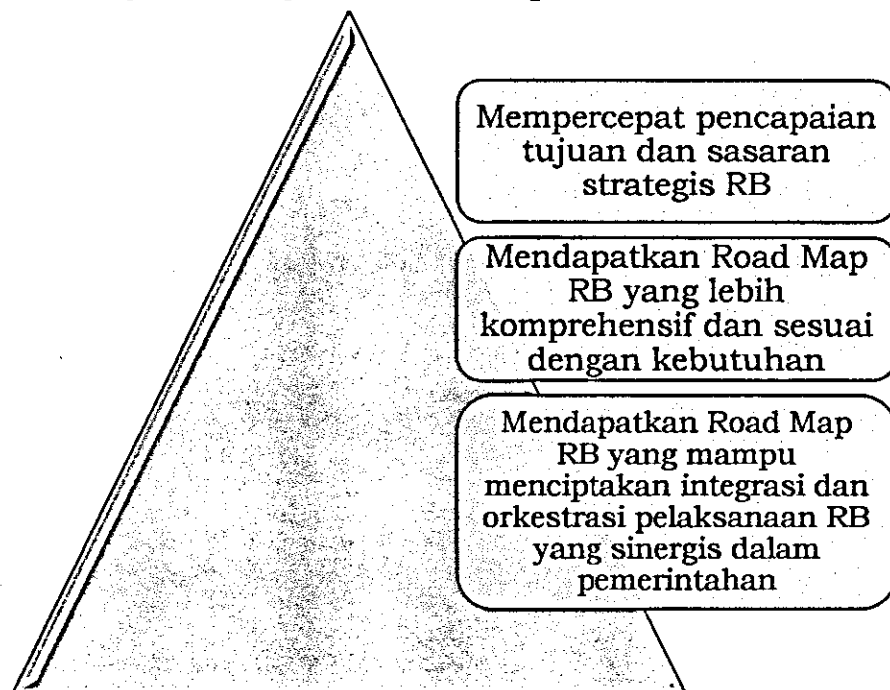
Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020

Pada periode ketiga atau terakhir pada *Grand Design* Reformasi Birokrasi ini, pemerintah diharapkan *adaptable* dalam perumusan kebijakan dan pelayanan publik, serta melakukan perubahan *mindset* dan *culture set* sehingga tiga fungsi pemerintahan yang terdiri dari pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan dapat tercapai. Selain itu pada fase ketiga ini pemerintah diharapkan dapat menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Selain itu perlu mengedepankan asas Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya reformasi birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan, sedangkan prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir Tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB 2020-2024.

Pada hakikatnya, *Road Map* RB harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB Nasional Tahun 2020-2024 seperti yang terdapat pada gambar berikut:

Gambar 1.2  
Tujuan Penajaman *Road Map* RB



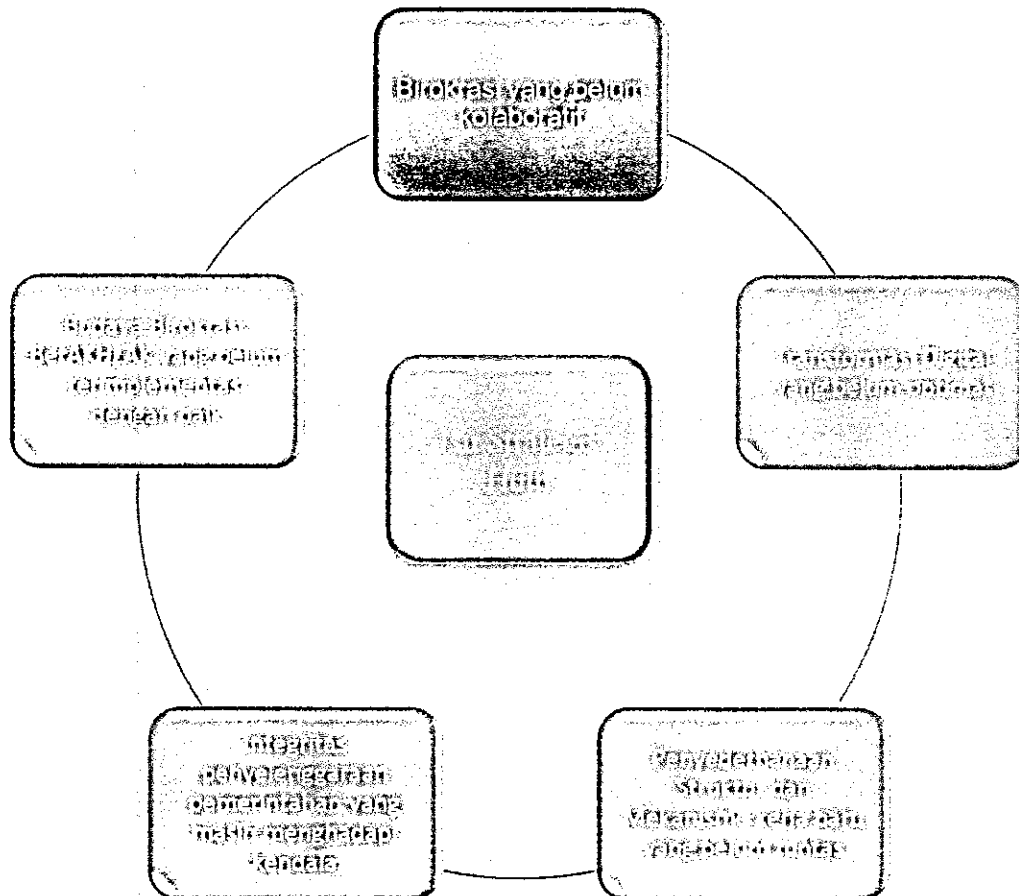
Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020

Penajaman *Road Map* RB 2020-2024 dilakukan untuk mengurangi silo (*fragmented*) antar Instansi Pemerintah. Pelaksanaan RB memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Kementerian/lembaga yang menjadi koordinator pengampu (*leading institution*) pelaksanaan RB juga perlu didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik, berorientasi hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman *Road Map* RB 2020-2024, seluruh Instansi Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Nasional.

## 1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3  
Isu Strategis di Tingkat Hulu

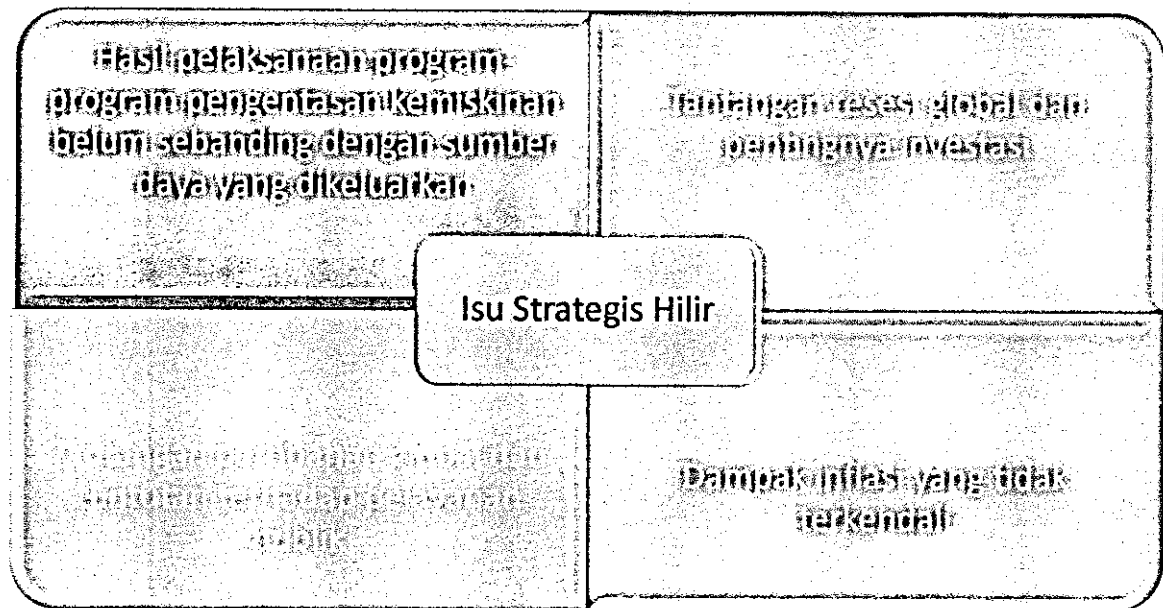


Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023

## 2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

Gambar 1.4  
Isu Strategis di Tingkat Hilir



Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023

Di Kabupaten Pringsewu, lulusan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang seimbang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti efek dari pandemik covid-19 belum sepenuhnya hilang. Meskipun keadaan di Kabupaten Pringsewu sudah semakin kondusif, meningkatnya paparan di beberapa wilayah seperti Ibukota Jakarta memicu kekhawatiran para pengusaha untuk melakukan ekspansi bisnis apabila kenaikan jumlah penderita akan dibarengi dengan pembatasan aktivitas. Selain itu, dengan pembatasan kegiatan di luar ruangan selama 2 tahun terakhir ini telah meningkatkan intensitas pemanfaatan teknologi sehingga terdapat pekerjaan yang sebelumnya menggunakan orang, kini telah digantikan oleh A.I (*Artificial Intelligence*) ataupun sistem yang terkomputerisasi, sehingga penyerapan tenaga kerja pun berkurang. Hal yang ditakuti dari berbagai kemungkinan yang ada adalah menurunnya minat kerja pada sektor kritical dan esensial generasi muda yang menjadi terbiasa memanfaatkan teknologi dalam beraktivitas sosial dan ekonomi, sehingga menimbulkan pergeseran minat dan kebiasaan.

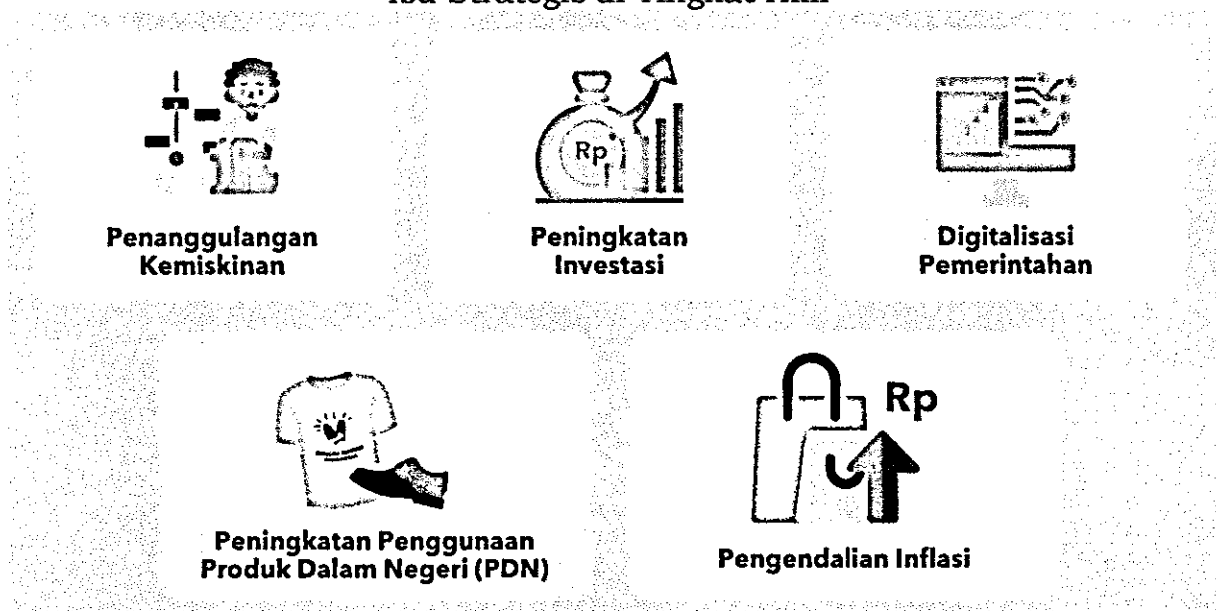
Kenaikan energi memicu kenaikan semua barang pokok yang pada akhirnya gelombang pasang inflasi menghantam keras perekonomian. Di Indonesia, kenaikan BBM subsidi dan non-subsidi tidak terelakkan sehingga pada akhirnya masyarakat di daerah turut merasakan imbasnya. Biaya angkut Bawang, sayuran, ikan, beras dan komoditas lainnya meningkat tajam. UMKM yang sebelumnya tahan terhadap krisis finansial global *subprime mortgage 2008* dan pelemahan rupiah 2018, kali ini turut mendapatkan ujian berat yang pada akhirnya dampak perlambatan laju pertumbuhan ekonomi tidak terbendung lagi. Meskipun begitu, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu (4,37%) masih lebih baik dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 4,28%.

### 3. Reformasi Birokrasi Tematik

RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif. Konsep RB Tematik, diharapkan dapat mendorong percepatan Reformasi Birokrasi yang kolaboratif dan efektif mengungkit capaian kinerja prioritas pembangunan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, pemerintah dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dengan berbagai pelaksanaan program - kegiatan yang sifatnya *problem solving-debottlenecking* dalam tata kelola pemerintah.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* RB 2020-2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan tema pelaksanaan RB Tematik Nasional yaitu:

Gambar 1.5  
Isu Strategis di Tingkat Hilir



Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023

#### a. Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multi-sektor. Tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan adalah besarnya anggaran terkait penanggulangan kemiskinan belum memberikan dampak signifikan pada besaran penurunan kemiskinan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini belum menjangkau target yang tepat.

## b. Peningkatan Investasi

Investasi menjadi katalisator pada Pembangunan Nasional serta mendukung pencapaian nilai positif dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Seiring dengan kenaikan investasi, maka PDB pun akan meningkat, begitu pun sebaliknya. Berbagai tantangan dalam peningkatan investasi masih dihadapi. RB Tematik peningkatan investasi ini berperan dalam mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (competitiveness index).

## c. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA menuntut birokrasi bekerja secara agile, adaptive dan cepat. Selain tuntutan global, kesadaran masyarakat akan pentingnya percepatan dan kemudahan pelayanan publik menjadi perhatian utama masyarakat.

## d. Percepatan Prioritas Aktual Presiden

RB Percepatan Prioritas Aktual Presiden berfokus pada penguatan tata kelola birokrasi merespons dan mengawal hal-hal mendesak sesuai arahan Presiden, sehingga dapat memitigasi risiko yang berdampak serius pada masyarakat. Percepatan prioritas aktual Presiden bersifat dinamis dan bisa berubah setiap tahunnya menyesuaikan dengan arahan Presiden.

### a) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

RB diarahkan untuk mendorong penggunaan anggaran pemerintah yang efektif (tepat sasaran), efisiensi serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang, jasa dan modal pemerintah. Strategi yang digunakan salah satunya adalah dengan mendominasi e-katalog pengadaan barang/jasa dengan produk buatan dalam negeri.

### b) Pengendalian Inflasi

RB berfokus pada upaya dan inovasi pemerintah dalam menekan dan mengendalikan laju inflasi daerah. Inflasi merupakan indikator makro perekonomian yang menggambarkan kondisi ekonomi yang dapat dikatakan kurang sehat. Hal ini dikarenakan kenaikan harga-harga barang secara umum berimplikasi pada menurunnya kemampuan daya beli masyarakat.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi. Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa kecepatan melayani serta birokrasi akuntabel, efektif dan efisien menjadi kunci bagi terwujudnya Reformasi Birokrasi.

Reformasi birokrasi merupakan sebuah komitmen nasional untuk mewujudkan sosok pemerintahan yang efektif dan efisien, serta bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka peran pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan reformasi sangatlah strategis. Salah satu peran konkrit pemerintah daerah dalam mendukung reformasi birokrasi nasional adalah dengan turut menjadi pelaku reformasi tersebut, antara lain dibuktikan dengan adanya *Road Map* sebagai manifestasi kesiapan menjalankan reformasi birokrasi.

Dengan demikian, maka pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap dimana satu tahapan harus menghasilkan output yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Berdasarkan realita empiris, embrio reformasi birokrasi sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu ini, diharapkan dapat mendukung akselerasi terwujudnya Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang profesional, dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah :

1. Sebagai pedoman dalam memberikan arahan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan;
2. Menjadi dokumen yang menjadi acuan perubahan birokrasi di setia unit kerja.

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang berbasis kinerja dengan membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui *smart government* yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima.

## C. Sistematika Penyusunan *Road Map*

Sistematika dalam Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu 2024-2026, sebagai berikut :

### RINGKASAN EKSEKUTIF

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika Penyusunan *Road Map*

#### BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

- A. Kondisi Eksisting sesuai dengan *Road Map* Refromasi Birokrasi 2024-2026
- B. Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu
- C. Isu Strategis Refromasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu
- D. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu



- BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH**
  - A. Penetapan dan Sasaran Reformasi Birokrasi**
  - B. Perencanaan Refromasi Birokrasi General**
  - C. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik**
  
- BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**
  - A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**
  - B. Mekanisme dan Monitoring Evaluasi Reformasi Birokrasi**
  
- BAB V PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH**

- A. Kondisi Eksisting sesuai dengan *Road Map* Refromasi Birokrasi 2023-2026 Hasil Antara area perubahan pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu, sebanyak 10 (delapan) hasil Antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Hasil Antara Area Perubahan Pemerintah Kabupaten Pringsewu

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai		Sumber Data
			2021	2022	
1.	Sistem Merit	1-400	-	105	KASN
2.	ASN Profesional	0-100	46,78	46,44	Badan Kepegawaian Negara
3.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	27,07	63,3	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
4.	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	2,03	2	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	2,95	3,61	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6.	Kapabilitas APIP	0-5	3	3	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
7.	Maturitas SPIP	0-5	3	3	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
8.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	30,29	41,95	Arsip Nasional Republik Indonesia
9.	Reformasi Hukum	0-100	-	52,7	Kementerian Hukum dan HAM
10.	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	91,67	73,02	Ombusman Republik Indonesia

Sumber. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada Tahun 2022 terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil Antara dan penambahan hasil Antara yang baru dilakukan pengukuran Tahun 2022. Untuk hasil Antara yang tidak dilakukan pengukuran pada Tahun 2022 menggunakan data tahun sebelumnya.

Komponen hasil Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 memperoleh nilai sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Komponen Hasil Tahun 2022

No.	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Opini BPK	Opini	WTP	BPK RI
2.	Nilai Sakip	0-100	66.35	Kementerian PANRB
3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	95.30	Kementerian PANRB
4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	85.05	SPI Eksternal oleh KPK
5.	Survey Internal Organisasi	0-100	82.45	SPI Eksternal oleh KPK

Sumber. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022

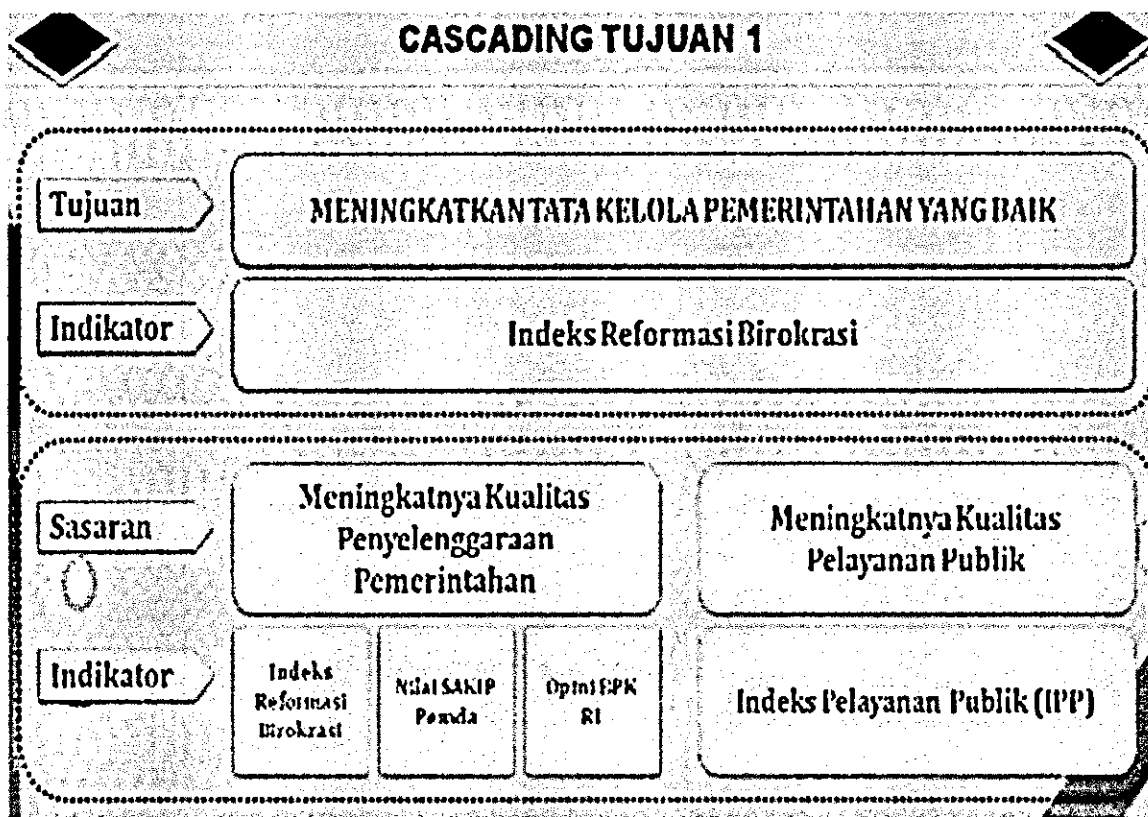
#### B. Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari setiap tujuan ditetapkan sasarannya. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat capaian keberhasilan sasaran yang akan diwujudkan. Adapun sasaran strategis yang sejalan dengan pelaksanaan RB Kementerian PANRB berjumlah 2 (dua) sasaran strategis, yaitu pada Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Pringsewu. Adapun sasaran dari masing-masing tujuan adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran pembangunan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik;
3. Angka Pertumbuhan Ekonomi;
4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Hubungan antara tujuan dengan sasaran pembangunan tersebut, dapat dipahami melalui desain *Logical Framework* sebagai berikut :

Gambar 2.1  
Logical Framework



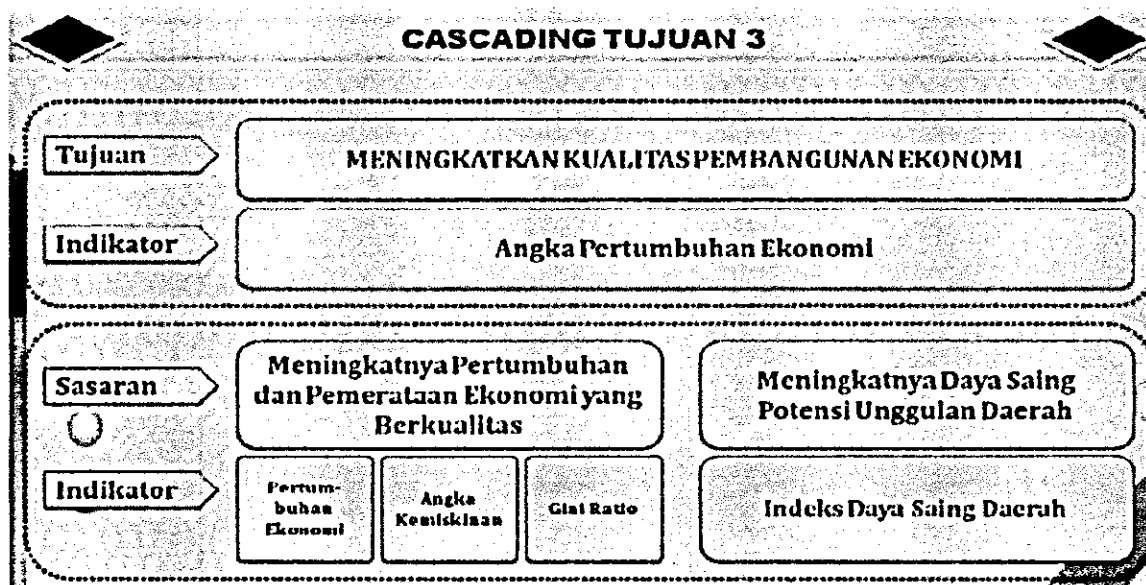
Sumber: RPD 2023-2026 Kabupaten Pringsewu

Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, dengan sasaran pembangunan, yaitu :

1. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas.;
2. Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah.

Hubungan antara tujuan dengan sasaran pembangunan tersebut, dapat dipahami melalui desain *Logical Framework* sebagai berikut :

Gambar 2.2  
Logical Framework



Sumber: RPD 2023-2026 Kabupaten Pringsewu

**Tabel 2.3**  
**Target Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 – 2026 dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir
						2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	51.24	54.01	57.01	60.01	63.01	63.01
			Nilai SAKIP	Nilai	63.27	67.01	70.01	72.01	74.01	74.01
		Opini BPK RI	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Persen	N/A	3.51	3.53	3.60	3.65	3.65
Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2.89	3.31	4.23	4.96	5.48	5.48
			Angka kemiskinan	Persen	10.11	9.68	9.47	9.25	9.04	9.04
			Gini Rasio	Indeks	0.310	0.309	0.308	0.307	0.306	0.306

Sumber : RPD 2023-2026 Kabupaten Pringsewu

### C. Isu Strategis Refromasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu

Memperhatikan berbagai permasalahan pembangunan, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, serta pertimbangan lainnya yang mencakup memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas, tanggung jawab dan kewenang Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, kemudahan untuk dikelola dan kondisi daerah, maka dirumuskan isu-isu strategis Reformasi Birokrasi pada lima tahun kedepan di Kabupaten Pringsewu yaitu mencakup :

#### 1. Percepatan Reformasi Birokrasi.

Paradigma birokrasi memiliki perspektif yang umum perihal tata laksana dan kelembagaan pada sektor pemerintah. Upaya-upaya menata lembaga membentuk kebijakan yang strategis selalu menjadi Pekerjaan rumah yang rutin untuk menemukan strategi yang efektif dan efisien dan berorientasi pada masyarakat. Namun demikian, proses penyusunan kelembagaan yang terjadi di pemerintahan terkadang tidak tepat sasaran dalam menjawab permasalahan yang ada dimasyarakat yang diakibatkan karena dinamika sosial yang bergerak sangat cepat sehingga dibutuhkan birokrasi yang tangkas (agile) dan dinamis (flexible). Untuk menginisiasi kebutuhan masyarakat maka birokrasi perlu memberlakukan penataan kelembagaan yang strategis, sesuai dan saling lintas sektor. Maka inisiasi yang diperlukan sebelum menentukan proses kelembagaan adalah penyusunan proses bisnis (bussines process). Sesuai dengan harapan Permenpan Nomor 19 tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis diharapkan proses kelembagaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Peta proses bisnis merupakan pemetaan yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi stakeholder. Jika dibandingkan dengan daerah lain nilai SAKIP Kabupaten Pringsewu pada tahun 2022 masih B, dan bahkan juga belum dilakukan penilaian untuk mengetahui Indeks Reformasi Birokrasi secara menyeluruh. Padahal nilai SAKIP dan nilai Indeks Reformasi Birokrasi, dapat dijadikan tolak ukur terhadap tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu maka aspek Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pringsewu, perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk dilaksanakan.

Pada saat ini, pemerintahan yang bersih dan baik sudah menjadi isu nasional, yang juga terjadi di Kabupaten Pringsewu. Sebagai salah satu upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik menjadi syarat utama. Namun harus diakui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi di Kabupaten Pringsewu masih menemui kendala. Pola pikir dan budaya kerja, belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional. Kompetensi ASN yang baik belum mampu menciptakan pelayanan publik yang berpihak kepada rakyat. E-government yang ada belum secara optimal mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel.

Reformasi birokrasi diarahkan untuk memaksimalkan kinerja birokrat dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik dilakukan oleh institusi pemerintahan yang meliputi pelayanan dasar dan pelayanan administrasi. Pelayanan dasar menyangkut pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, permukiman, perlindungan sosial, dan keamanan serta lain-lain. Sedangkan pelayanan administrasi menyangkut pelayanan pendataan sebagai konsekuensi dari status warga negara yang bermukim di suatu daerah, seperti pelayanan KTP, perijinan usaha, kartu keluarga dan administrasi kepemilikan.

## 2. Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah serta Profesional.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 menjamin bahwa setiap masyarakat berhak untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik. Bicara masalah pelayanan publik adalah membicarakan antara sistem, metode dan kapabilitas sumber daya manusia dan merupakan topik pembicaraan yang klasik. Sistem-sistem yang dibangun oleh kebijakan pemerintah daerah berupaya untuk melakukan penyederhanaan, mengintegrasikan sumber-sumber data dan resources serta mengurangi intervensi manusia sebagai faktor human error. Namun disisi lain, tingkat kepuasan masyarakat juga akan terus berkembang. Karena itu maka upaya perbaikan sistem pelayanan publik harus terus dilakukan.

Isu Pelayanan akan tetap ada dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang berkembang. Secara Umum aspek-aspek dalam pelayanan ada 5 dimensi yakni dimensi penjaminan, dimensi ketanggapan, dimensi keandalan, dimensi empati dan dimensi bukti langsung. Dimensi-dimensi tersebut cukup relevan dengan kondisi existing yang ada di Kabupaten Pringsewu. Seperti fasilitas sarana prasarana yang perlu ditingkatkan merujuk kepada dimensi Bukti Langsung (*tangible*) yakni fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang perlu ditingkatkan. Dimensi penjaminan (*assurance*) yang merujuk kepada sumber daya manusia dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dimensi keandalan (*reliability*) tentang prosedur pelayanan dituntut cepat dan jelas.

Upaya untuk merespon hal tersebut adalah dengan peningkatan kualitas pelayanan dan inovasi-inovasi yang langsung dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Dengan jalan memanfaatkan potensi Teknologi Informasi hingga pekon-pekon an pelayanan secara individu (*self-service*). Untuk mendukung inovasi pelayanan yang dapat menyentuh masyarakat maka pemerintah perlu melakukan breakdown pelayanan di level terendah atau pekon agar bisa dijangkau masyarakat.

Tantangan kedepan ialah bagaimana jenis-jenis pelayanan publik dapat diakses tanpa harus datang ke kantor layanan. Pemanfaatan media Big Data atau One Data masih menjadi isu yang cukup berkembang di Pemerintahan daerah. Output dari adanya penyatuan data ini adalah pemanfaatan pembuatan kebijakan dengan sumber yang terpercaya dan cepat. Proses penyempurnaan data dalam satu portal melibatkan berbagai stakeholder dan juga kedisiplinan untuk tetap secara konsisten menyempurnakan data yang terintegrasi.

### 3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pada Tahun 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu sebesar 9,89% atau terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 10,15%. Namun pada Tahun 2021 terjadi kenaikan kembali menjadi sebesar 10,11%. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan melalui kebijakan peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan dan pembinaan untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Implementasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) harus lebih intensif sebagai upaya penanggulangan kemiskinan yang terpadu lintas bidang. Realitas ini tentu menjadi tantangan Kabupaten Pringsewu pada periode pembangunan kedepan dalam hal pengentasan kemiskinan. Pasalnya, ruang bagi masyarakat Kabupaten Pringsewu untuk keluar dari jerat kemiskinan seperti akses usaha, lapangan kerja dan sejenisnya masih relatif sulit bagi mereka untuk dijangkau. Selain itu, latar belakang pendidikan yang kurang bersaing serta lembaga pelatihan kerja yang belum optimal baik dari segi jumlah maupun dari segi kesesuaian terhadap pangsa kerja di Kabupaten Pringsewu turut memberikan tekanan bagi masyarakat Kabupaten Pringsewu untuk dapat mandiri dan berdaya. Memperhatikan tantangan-tantangan tersebut, jika tidak ada treatment atau perhatian khusus pada isu ini maka masalah kemiskinan di Kabupaten Pringsewu bisa jadi menjadi bertambah rumit dan konsekuensinya angka kemiskinan bahkan mungkin kedalaman serta keparahan kemiskinan dapat meningkat dimasa yang akan datang.

#### 4. Pengembangan Kawasan Pertumbuhan ekonomi sesuai dengan RTRW

Pembangunan infrastruktur dan ekonomi memiliki hubungan timbal balik, karena pembangunan infrastruktur dapat menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek multiplier. Sementara ekspansi ekonomi juga akan menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada, untuk menyerap makin besarnya aliran barang dan orang yang beredar atau bersirkulasi di seluruh perekonomian. Ketika keadaan infrastruktur di sebuah daerah kurang optimal, dapat berarti bahwa perekonomian pada daerah tersebut berjalan dengan cara yang kurang efisien. Biaya distribusi dan produksi yang tinggi akan berujung pada rendahnya daya saing usaha.

Kondisi itulah yang terjadi di Kabupaten Pringsewu. Kawasan strategis yang sudah diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu belum dioptimalkan. Hal ini terlihat dari masih minimnya infrastruktur pendukung yang dapat mengembangkan potensi kawasan yang di milikinya. Oleh karena itu maka pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pringsewu perlu ditingkatkan secara lebih merata, mengingat Kabupaten Pringsewu memiliki berbagai potensi di sektor ekonomi yang perlu dikembangkan, seperti sektor pariwisata, pertanian dan UMKM. Infrastruktur transportasi yang buruk berimplikasi pada beban masyarakat dalam penyediaan produksi dan mobilisasi sumberdaya. Pembenahan infrastruktur secara masif, akan memberikan dampak positif pada pengurangan beban mobilisasi sumber-sumber produksi di wilayah penghubung antar kabupaten. Selain itu pengembangan dan pembenahan sarana transportasi publik juga menjadi hal penting, guna mengurangi beban arus distribusi dan berefek domino pada koneksitas antar wilayah yang semakin kuat. Oleh karena itu maka pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, penyediaan air baku serta air bersih merupakan kebutuhan yang dapat dirasakan manfaat dan akibatnya secara langsung oleh masyarakat. Infrastruktur harus dapat menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya terutama perwujudan infrastruktur strategis dan sistem yang dapat diadopsi dalam rangka pemerataan pembangunan bidang infrastruktur. Pemenuhan kebutuhan terhadap air bersih untuk permukiman perlu ditingkatkan, demikian pula penyediaan air baku.

#### D. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah. Untuk menghasilkan strategi yang baik, maka perlu dilakukan dengan mengembangkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;



2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran perangkat daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Organisasi Perangkat daerah;
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Dalam Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026, penentuan strategi pembangunan daerah, dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Melalui analisis SWOT, diidentifikasi faktor internal yang mencakup aspek kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal yang mencakup aspek peluang dan tantangan. Kemudian keempat aspek tersebut diinteraksikan, sehingga menghasilkan formula strategi sebagai berikut :

Pertama, Strategi S-O (*Strengths-Opportunities*) yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk memanfaatkan peluang eksternal. Strategi ini merupakan kondisi yang sangat diharapkan, daerah memiliki peluang dan kekuatan disaat yang sama, sehingga dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya atau biasa disebut *comparative advantage*. Strategi yang harus diterapkan dapat mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Strategi ini memberikan penekanan pada metode pemerintah daerah dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada.

Kedua, Strategi S-T (*Strengths-Threats*) yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk mengatasi tantangan eksternal. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai *mobilization strategy*, dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada, pemerintah didorong untuk menggeser tantangan menjadi peluang jangka panjang. Oleh sebab itu perlu disusun sebuah strategi yang mampu menghasilkan peluang jangka panjang, berdasarkan tantangan yang dimiliki.

Ketiga, Strategi W-O (*Weakness-Opportunities*) yaitu meminimalisasi kelemahan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam rangka untuk memanfaatkan peluang eksternal. Pemerintah daerah menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak harus menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Dalam kondisi ini pilihan strategi yang mungkin ada 2 (dua), yaitu strategi yang bersifat *investment* dan yang bersifat *divesment*. Bersifat investasi sebab, strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Kedua, *divestasi* kelemahan yang dimiliki, hal ini bisa terjadi jika pemerintah telah benar-benar memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Pilihan terbaiknya adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Pringsewu bisa melakukan investasi jangka panjang untuk mengatasi kelemahannya, supaya bisa lebih *competitive* atau memiliki daya saing.

Keempat, Strategi W-T (*Weakness-Treaths*), merupakan strategi untuk bertahan atau meminimalisasi kelemahan internal untuk mengatasi tantangan eksternal. Pilihan ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, secara bersamaan. Strategi ini bersifat *defensive* atau strategi untuk *survive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam analisis lingkungan diatas, faktor tantangan dan kelemahan sangat banyak mendominasi.

Sehingga strategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini juga lebih banyak dibutuhkan. Strategi ini dikenal sebagai damage control, yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki.

Melalui proses analisis SWOT yang telah dilakukan tersebut, selanjutnya diperoleh dan ditetapkan beberapa strategi Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif dan inovatif;
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung dan SDM pengelola pelayanan publik;
3. Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi daerah;
4. Meningkatkan sarana prasarana perdagangan, pemberdayaan UMKM, dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Tebel 2.4  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

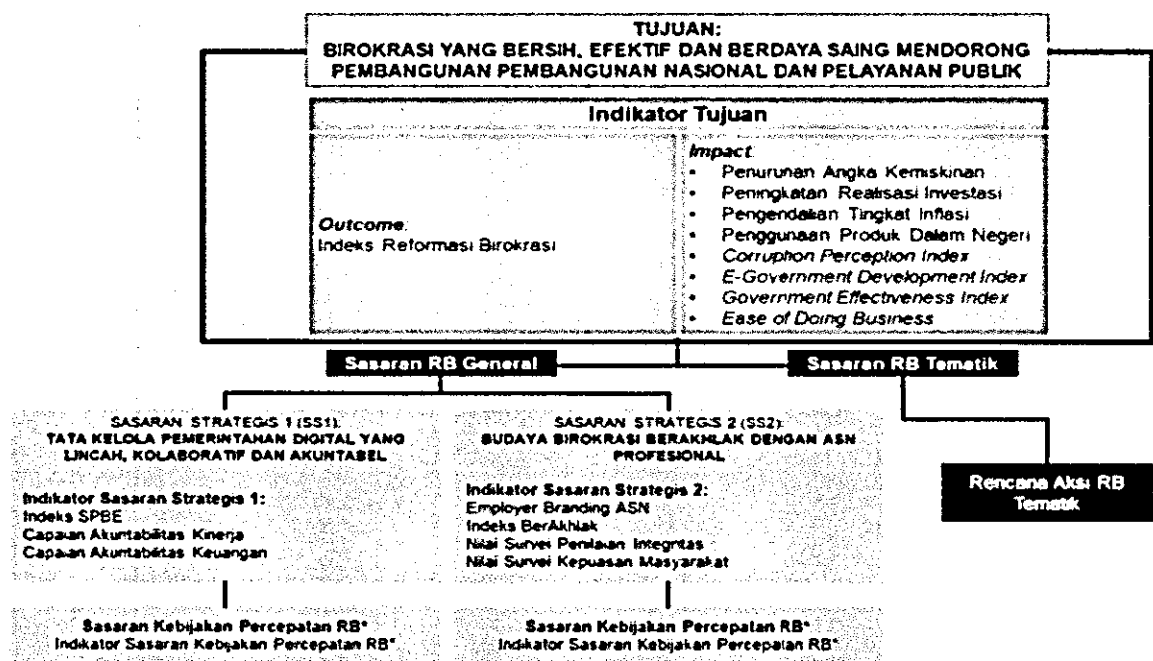
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahann	Meningkatkan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif dan inovatif	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis, adaptif dan inovatif.
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung dan SDM pengelola pelayanan publik	Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik berbasis elektronik. Peningkatan kualitas aparatur pengelola pelayanan publik.
2.	Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi daerah	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas	Meningkatkan sarana prasarana perdagangan, pemberdayaan UMKM, dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok	Peningkatan kualitas produksi UMKM dan sarana distribusi perdagangan. Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan cadangan pangan masyarakat.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Pemberdayaan usaha masyarakat miskin dan pemenuhan perlindungan jaminan sosial.
		Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi daerah	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas	Meningkatkan sarana prasarana perdagangan, pemberdayaan UMKM, dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok

Sumber : RPD Kabupaten Pringsewu 2023-2026

1. Target Kinerja Reformasi Birokrasi  
 Kerangka logis indikator kinerja RB setelah dilakukan penajaman dapat dilihat pada Gambar 2.3

Gambar 2.3  
 Kerangka Logis Indikator Reformasi Birokrasi



Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023

Kinerja Pelaksanaan RB dicerminkan dengan pencapaian target kinerja sesuai dengan jenjang kinerja. Penjenjangan kinerja pelaksanaan RB sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka logis kinerja dan indikator kinerja RB pada gambar 2.3, yaitu pada tingkat tujuan, sasaran strategis, sasaran kebijakan dan output kegiatan. Target kinerja pada tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB sampai Tahun 2024 dinyatakan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Target dan capaian Kinerja Tujuan**

Tujuan Refromasi Birokrasi 2023-2024	Indikator Tujuan	Target Road Map RB Nasional	Target RPD Kabupaten Pringsewu 2024	Kondisi Eksiting Kabupaten Pringsewu
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	25,79 Kab/Kota Minimal baik	57,01	58,49
	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan)	9,71	9,04	9,34
	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Investasi)	826.3 Meningkatkan	495 Milyar	544 Milyar

2. Target dan Kinerja Sasaran Strategis

**Tabel 2.3**  
**Target dan Kinerja Sasaran Strategis**

No.	Sasaran Startegis RB	Indikator Sasaran Strategis	Target Road Map RB Nasional	Target RPD Kabupaten Pringsewu 2024	Kondisi Eksiting Kabupaten Pringsewu
1.	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	23,58 % baik	2,85	2,00
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	66,73 Baik	70,01	66,35
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	91,91 % WTP	WTP	WTP
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Employer Branding (sumber: Kementerian PANRB)	6,90%	-	-
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK (sumber: Kementerian PANRB)	60,9 %	-	62,3
		Nilai Survei Penilaian Integritas (sumber: KPK)	71,4	-	85,05
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	74,89	95,00	85,10

**BAB III**  
**AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH**

**A. Penetapan dan Sasaran Reformasi Birokrasi**

Berikut Penetapan Kegiatan Utama Kabupaten Pringsewu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 :

Tabel. 3.1  
Penetapan Kegiatan Utama

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target tahunan				Unit/satuan Kerja	
				2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan birokrasi	100	100	100	100	100	Bagian organisasi	Seluruh Perangkat daerah
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Impelemntasi Sistem Kerja baru dan flesibilitas bekerja pegawai	-	10	25	50	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh Perangkat daerah
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2.00	2.45	2.85	3.00	3.25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat daerah
		Tingkat Implementasi Kebijakan SPBE	-	50	70	80	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat daerah
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai Sakip	66.35	67.01	70.01	72.01	74.01	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat daerah
		Indeks Perencanaan Pembangunan	-	69	73	75	78	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target tahunan				Unit/satuan Kerja	
				2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	implementasi kebijakan pelayanan publik digital	73.02	75.05	80.32	82.05	85.02	Bagian organisasi	Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	-	WBK	WBK	WBK	WBK	Inspektorat	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Bagian Organisasi
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	Inspektorat	Seluruh Perangkat daerah
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	28	25	22	19	16	Dinas Komunikasi dan informatika	Seluruh Perangkat daerah
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	75.73	75.80	76.24	76.68	77.12	Inspektorat	Seluruh Perangkat daerah
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks kualitas kebijakan	-	51	61	66	70	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat daerah
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan	Indeks Reformasi Hukum	52.7	53.00	54.00	55.00	56.00	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat daerah
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	41.95	43.55	48.75	56.20	60.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh Perangkat daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target tahunan				Unit/satuan Kerja	
				2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	63.3	64.08	65.25	66.33	67.32	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh Perangkat daerah
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Seluruh Perangkat daerah
		Tindak lanjut Hasil Temuan BPK	-	100	100	100	100	Inspektorat	Seluruh Perangkat daerah
16	Penataan Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit	105	164	205	246	250	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Seluruh Perangkat daerah
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN								
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN								
19	Penguatan Sistem Merit								
20	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Indeks Berakhlak	62,3	65,00	68,00	70,00	76,03	Bagian organisasi	Seluruh Perangkat daerah
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87.50	89.40	90.15	91.00	90.10	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
		Indeks Pelayanan Publik	3.61	3.51	3.53	3.60	3.65	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat daerah
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	85.30	86.50	87.23	90.00	90.50	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat daerah

B. Perencanaan Refromasi Birokrasi General

Tabel 3.2  
Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama

No	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat keparahan (Implementasi rendah)	Waktu (mendesak)	Skala Prioritas (total skor)
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	10	7	8	25
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	10	7	6	23
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	10	10	10	30
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	10	10	30
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	10	7	7	24
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	10	8	9	27
7	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	10	9	9	28
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	8	7	25
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	10	9	10	29
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	10	7	7	24
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	10	8	10	28
12	Pelaksanaan Arsip Digital	10	9	9	28
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	10	6	6	22
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	10	9	10	29
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	10	9	10	29
16	Penataan Jabatan Fungsional	10	9	10	29
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	10	9	10	29
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	10	9	10	29
19	Penguatan Sistem Merit	10	9	10	29
20	Pelaksanaan Core Values ASN	10	7	9	26
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	10	10	10	30



Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Pringsewu menetapkan 17 (tujuh belas) Kinerja Utama dan 18 (delapan belas) Indikator Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan 5 (lima) Kinerja Utama dan 5 (lima) Indikator Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga pada tahun 2025-2026 seluruh target kegiatan utama diharapkan dapat tercapai. Rincian klasifikasi Prioritas Penetapan Target Kegiatan Utama Kabupaten Pringsewu untuk Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Penetapan Target Kegiatan Utama Tahun 2023

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target tahunan				Unit/satuan Kerja	
				2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
1.	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan birokrasi	80	85	90	95	100	Bagian organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
2.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2.03	2.85	3.10	3.35	3.60	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah
3.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai Sakip	66.35	67.01	70.01	72.01	74.01	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
		Indeks Perencanaan Pembangunan	-	69	73	75	78	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
4.	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Predikat Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM)	-	WBK	WBK	WBK	WBK	Inspektorat	1. Disdukcapil 2. DPMPSTP 3. Bagian Organisasi
5.	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor SPIP	3	3	3	3	3	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target tahunan				Unit/satuan Kerja	
				2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
6.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	28	25	22	19	16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah
7.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	75.73	75.80	76.24	76.68	77.12	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
8.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	52.7	53.00	54.00	55.00	56.00	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah
9.	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat kualitas pengelolaan arsip digital	41.95	43.55	48.75	56.20	60.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh Perangkat Daerah
10.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	63.3	64.08	65.25	66.33	67.32	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh Perangkat Daerah
11.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Seluruh Perangkat daerah
		Tindak lanjut Hasil Temuan BPK	-	100	100	100	100	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
12.	Penataan Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit	105	164	205	246	250	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Seluruh Perangkat Daerah
13.	Penguatan Manajemen Talenta ASN								
14.	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN								
15.	Penguatan Sistem Merit								
16.	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	62,3	65,00	68,00	70,00	76,03	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target tahunan				Unit/satuan Kerja	
				2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
17.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87.50	89.40	90.15	91.00	90.10	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
		Indeks Pelayanan Publik	3.61	3.51	3.53	3.60	3.65	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	85.30	86.50	87.23	90.00	90.50	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah

Tabel 3.4  
Penetapan Target Kegiatan Utama Tahun 2024

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target tahunan				Unit/satuan Kerja	
				2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
1.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan SPBE	-	50	70	80	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat daerah
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Impelemntasi Sistem Kerja baru dan fleabilitas bekerja pegawai	-	10	25	50	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh Perangkat daerah
3.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Implementasi kebijakan pelayanan publik digital	73.02	75.05	80.32	82.05	85.02	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan
4.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks kualitas kebijakan	-	51	61	66	70	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target tahunan				Unit/satuan Kerja	
				2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
5.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

### C. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB Nasional 2020-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga Tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, Kabupaten Pringsewu menetapkan empat (4) tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yaitu:

#### 1. Pengentasan Kemiskinan

RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

#### 2. Peningkatan Investasi

RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). RB Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

### 3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting.

### 4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden

Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

Berikut kami ajukan tema dan rencana aksi RB Tematik Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4  
Penetapan Tema RB Tematik

No.	Target Tahunan	Kondisi Eksaiting	Satuan	Target	Kesesuaian Prioritas RPD	Keparahan Masalah	Dampak terhadap kesejahteraan masyarakat	Potensi yang dimiliki	Percepatan Kinerja	Nilai Total
1.	Pengentasan Kemiskinan	9,34	Persen	9,68	10	9	10	9	9	47
2.	Peningkatan Investasi	544	Milyar/ Tahun	450	10	7	10	9	9	45
3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintah (Penanganan Stunting)	16,20	Persen	13,50	10	9	10	7	9	45

4.	Percepatan Prioritas Aktual Presiden (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN))	57.58	Persen	60.00	10	8	10	8	9	45
5.	Pengendalian Inflasi	2.74	Persen	2.50-3.00	10	7	10	9	8	44

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pemerintah Kabupaten Pringsewu akan menetapkan Tema RB Tematik, sebagai berikut :

#### 1. Pengentasan Kemiskinan

Pada tahun 2022 angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu mengalami trend penurunan sebesar 0,77 dari yang semula 10,11 menjadi 9,34. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu dilakukan melalui kebijakan peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan dan pembinaan untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Implementasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) harus lebih intensif sebagai upaya penanggulangan kemiskinan yang terpadu lintas bidang. Realitas ini tentu menjadi tantangan Kabupaten Pringsewu pada periode pembangunan kedepan dalam hal pengentasan kemiskinan. Pasalnya, ruang bagi masyarakat Kabupaten Pringsewu untuk keluar dari jerat kemiskinan seperti akses usaha, lapangan kerja dan sejenisnya masih relatif sulit bagi mereka untuk dijangkau. Selain itu, latar belakang pendidikan yang kurang bersaing serta lembaga pelatihan kerja yang belum optimal baik dari segi jumlah maupun dari segi kesesuaian terhadap pangsa kerja di Kabupaten Pringsewu turut memberikan tekanan bagi masyarakat Kabupaten Pringsewu untuk dapat mandiri dan berdaya. Memperhatikan tantangan-tantangan tersebut, jika tidak ada treatment atau perhatian khusus pada isu ini maka masalah kemiskinan di Kabupaten Pringsewu bisa jadi menjadi bertambah rumit dan konsekuensinya angka kemiskinan bahkan mungkin kedalaman serta keparahan kemiskinan dapat meningkat dimasa yang akan datang.

## 2. Peningkatan Investasi

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu adalah kualitas pelayanan publik yang masih belum maksimal, akuntabilitas kinerja, kapasitas SDM, dan tata laksana serta masih kurang maksimalnya capaian realisasi investasi daerah. Namun hal ini secara bertahap telah dilakukan perbaikan dan telah membuahkan hasil dengan adanya peningkatan pada nilai indeks kualitas pelayanan publik dari 3,13 (Tahun 2021) menjadi 3,73 (Tahun 2022) dan meningkatnya realisasi investasi daerah dari 25,586 Milyar (Tahun 2021) menjadi 554 Milyar (Tahun 2022).

## 3. Digitalisasi administrasi Pemerintah (penanganan Stunting)

Kabupaten Pringsewu telah menyusun Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 perihal Rencana aksi daerah penurunan Stunting Tahun 2022-2024 dengan Target Penurunan Stunting Kabupaten Pringsewu mengikuti Target Nasional yaitu menggunakan metode SSGI, pada Tahun 2022 angka Stunting Kabupaten Pringsewu sebesar 16,2% atau turun 2,8% dari Tahun 2021 sebesar 19% dan target penurunan stunting tahun 2023 yaitu 13,5%, 2024 sebesar 10,91 % dan tahun 2025 sebesar 9,41%, sedangkan berdasarkan data E PPGBM Target Penurunan Stunting sampai dengan 2026 adalah 8,22 %. Upaya yang telah dilakukan di dalam Pencegahan dan penurunan stunting yaitu :

- a. Aksi Konvergensi Stunting yaitu analisa stunting, rencana kegiatan, rembuk stunting Tingkat Kabupaten Pringsewu, menetapkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan percepatan penurunan stunting, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi data stunting dan review kinerja tahunan;
- b. Melakukan Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting yaitu MASHASKO (Masyarakat Bapak Asuh Stunting dan Keluarga Beresiko).

Permasalahan pengukuran dan publikasi data stunting dalam digitalisasi pemerintahan untuk meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dihadapi yaitu rendahnya capaian keterbukaan informasi Badan Publik. Didalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pringsewu telah mempunyai inovasi yang digunakan antara lain Aplikasi SIMONSTER (Sistem Informasi Monitoring Pendampingan Keluarga Dengan Stunting Terpadu) yaitu aplikasi untuk memvalidasi dan memonitor intervensi yg dilakukan serta perkembangan terhadap semua sasaran keluarga dengan stunting (Reslating = resiko melahirkan stunting untuk calon Pengantin, Rattng = resiko membuat stunting untuk Ibu Menyusui, Koding = kondisi stunting untuk Balita, Editing = resiko jadi stunting untuk Balita) dan Level Pengguna seperti Pekon Input data sasaran sesuai dengan data yang ada, dan hanya bisa melihat data di pekon tersebut yang diinput oleh masing-masing TPK, Kecamatan dapat memonitoring data yang ada di wilayahnya dan Kabupaten dapat memonitoring data secara keseluruhan. Aplikasi ini diharapkan dapat menunjang Aksi 6 Manajemen data dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Penurunan Stunting di Kabupaten Pringsewu.

#### 4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN))

##### a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu mulai menerapkan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dalam struktur belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022, serta melaksanakan arahan Presiden dalam Instruksi Presiden Nomor 2/2022 yaitu dengan telah membentuk Tim P3DN; Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk UMK dan Koperasi pada e-katalog sektoral/e-katalog lokal. E-katalog lokal adalah aplikasi belanja *online* yang di kembangkan oleh LKPP yang menyediakan berbagai macam produk / Komoditas lokal yang di butuhkan oleh pemerintah serta seluruh organisasi perangkat daerah di kabupaten pringsewu telah melaksanakan Komitmen implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dalam penyelamatan ekonomi nasional.

##### b. Pengendalian Inflasi

Meskipun Pemerintah Kabupaten Pringsewu tidak masuk dalam dasar perhitungan inflasi gabungan karena dianggap memiliki kecenderungan pergerakan harga yang relatif sama dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang menjadi sampel, tetapi Kabupaten Pringsewu melakukan perhitungan mandiri untuk menghitung laju inflasi sebagai langkah konkrit dalam mendukung percepatan prioritas aktual Presiden. Kabupaten Pringsewu telah melakukan inspeksi ke pasar-pasar tradisional untuk memastikan stabilitas harga barang kebutuhan pokok serta mengadakan pasar murah yang ditujukan kepada kalangan masyarakat yang kurang mampu.



Tabel 3.5  
Tema RB Tematik

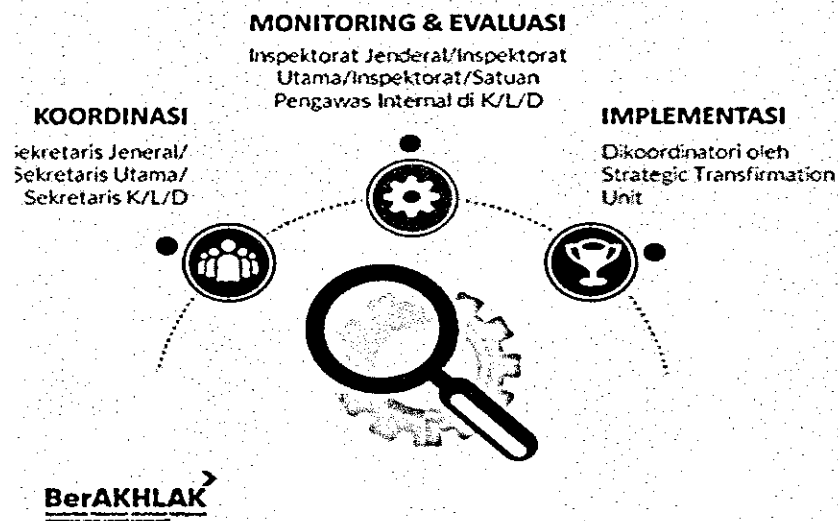
Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Satuan	<i>Base line</i>	Target			
				2022	2023	2024	2025	2026
Pengentasan Kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persen	9,34	9,68	9,47	9,25	9,04
Peningkatan Investasi	Peningkatan Nilai Investasi	Nilai Investasi	Milyar	544	450	495	544,5	598,9
Digitalisasi administrasi Pemerintah (penanganan Stunting)	Menurunnya angka stunting	Angka Stunting	Persen	16,20	13,50	10,91	9,41	8,22
Percepatan Prioritas Aktual Presiden (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN))	Meningkatnya Penggunaan Produk dalam negeri	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	57,58	60,00	60,00	61,00	62,00
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya Inflasi	Laju Inflasi	Persen	5.37	2.50-3.00	2.50-3.00	2.50-3.00	2.50-3.00

## BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

### A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Agar pelaksanaan RB dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan RB agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

Gambar 4.1  
Manajemen Pengelolaan Tim RB



Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020

Pada implementasinya setiap pelaksanaan reformasi birokrasi level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten telah dilaksanakan. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal di Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal pemerintahan.

Tugas Tim Reformasi Birokrasi Internal Pemerintah Kabupaten Pringsewu

- ✓ Merumuskan *Road Map* Pelaksanaan RB di Lingkungan Instansi Pemerintah dan unit kerja;
- ✓ Melaksanakan *Road Map* RB dan program prioritas di setiap unit kerja;
- ✓ Menjaga kesinambungan program yang telah berjalan dengan baik;
- ✓ Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB di instansi dan unit kerjanya;
- ✓ Melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan akan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan terhadap *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB Internal pemerintah daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program RB internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

## 1. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General

- Penanggung Jawab : Sekretariat Daerah  
Anggota : 1. Inspektorat;  
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;  
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;  
5. Dinas Komunikasi dan Informatika;  
6. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  
8. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;  
9. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;  
10. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

## 2. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik

### a. Pengentasan Kemiskinan

- Ketua Tim : Dinas Sosial  
Anggota : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;  
2. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;  
3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;  
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  
5. Dinas Pertanian;  
6. Dinas Perikanan;  
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;  
8. Dinas Kesehatan;  
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  
10. Dinas Ketahanan Pangan;  
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;  
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  
13. Dinas Komunikasi dan Informatika.

### b. Peningkatan Investasi

- Ketua Tim : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
Anggota : 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;  
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  
3. Dinas Komunikasi dan Informatika;  
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;  
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  
6. Dinas Perhubungan.

### c. Digitalisasi administrasi Pemerintah (penanganan Stunting)

- Ketua Tim : Dinas Komunikasi dan Informatika  
Anggota : 1. Badan Perencanaan Pembangunan daerah;  
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  
3. Dinas Kesehatan;  
4. Dinas Sosial;  
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  
6. Dinas Ketahanan Pangan;  
7. Dinas Pertanian;

8. Dinas Perikanan;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
10. Sekretariat Daerah.

d. Percepatan Prioritas Aktual Presiden (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN))

Ketua Tim : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

- Anggota :
1. Inspektorat;
  2. DPRD Kabupaten Pringsewu;
  3. Badan Pendapatan Daerah;
  4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  5. Dinas Kesehatan;
  6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
  8. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
  9. Bagian Umum;
  10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  12. Dinas Ketahanan Pangan;
  13. Dinas Perikanan;
  14. Dinas Pertanian.

e. Pengendalian Inflasi

Ketua Tim : Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah

- Anggota :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  3. Dinas Pertanian;
  4. Dinas Perikanan;
  5. Dinas Sosial;
  6. Dinas Ketahanan Pangan;
  7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
  8. Dinas Komunikasi dan Informatika.

B. Mekanisme dan Monitoring Evaluasi Reformasi Birokrasi

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan reformasi, baik pada entitas Pemerintah Daerah maupun entitas Perangkat daerah adalah upaya monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini dilakukan upaya penguatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam setiap upaya monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Monitoring dilaksanakan secara berkala setiap triwulan untuk memastikan *Road Map/Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perangkat daerah* dilaksanakan sesuai tata kala dan terdokumentasi dengan baik; mendapatkan data/informasi capaian pelaksanaan dan kendala pelaksanaan; serta merumuskan langkah perbaikan/percepatan;
3. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun untuk mendapatkan data capaian hasil, data perbandingan kondisi sebelum dan sesudah serta kendala pelaksanaan.
4. Menindaklanjuti setiap hasil monitoring dan evaluasi dengan upaya perbaikan berkala.

## BAB V PENUTUP

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2024-2026 merupakan fase yang sangat krusial untuk mewujudkan karakter birokrasi berkelas dunia. Tantangan untuk mewujudkan karakter birokrasi kelas dunia tidak ringan, namun keberhasilan mewujudkannya akan sangat berdampak pada meningkatnya kepercayaan dunia dan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah. Kepercayaan yang tinggi terhadap birokrasi pemerintah selanjutnya akan berdampak pada optimalnya pelaksanaan setiap program-program pemerintah.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu diharapkan harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak untuk dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukan performa/kinerjanya. Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024-2026 ini merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun merupakan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun yang jelas. Dokumen *Road Map* ini secara substansial telah memuat strategi, kebijakan dan sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahapan kegiatan. Kebijakan dan rincian kegiatan yang ada dalam dokumen *Road Map* ini merupakan kegiatan prioritas dan strategis dalam mendukung percepatan tercapainya sasaran reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Diharapkan dengan adanya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu 2024-2026, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat berjalan lebih baik lagi sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan masyarakat umum secara keseluruhan.

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL  
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**

Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target penyelesaian					Jumlah anggaran	Unit/satuan kerja	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	pelaksana
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi Organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100	Menyampaikan surat persetujuan penyetaraan jabatan	Dokumen	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi	1				1		Bagian Organisasi	Seluruh PD
			Menyusun Perbup Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perbup yang disusun	1				1		Bagian Organisasi	Seluruh PD
			Menyusun SK Bupati Pringsewu Nomor : B/44/KPTS/U.0 8/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok	Dokumen	Jumlah Dokumen SK yang disusun	1				1		Bagian Organisasi	Seluruh PD

Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target penyelesaian					Jumlah anggaran	Unit/satuan kerja	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	pelaksana
			Subtansi dan kelompok Sub Subtansi dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator diliningkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu										
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2.45	Penyusunan Road Map SPBE	Dokumen	Jumlah Dokumen Road Map SPBE	-	-	-	1	1		Kominfo	Seluruh PD
			Arsitektur SPBE	Dokumen	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE	-	-	-	1	1		Kominfo	Seluruh PD
			Penyusunan Perbup SPBE	Dokumen	Jumlah Dokumen Perbup SPBE	-	-	-	1	1		Kominfo	Seluruh PD
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai Sakip	67.01	Penyusunan Tim Lakip	Dokumen	SK Sekretaris Daerah	1				1		Bagian Organisasi	Seluruh PD
			Penjenjangan dan Perencanaan Kinerja	Dokumen	Jumlah Dokumen	1	-	-	-	1		Bagian Organisasi	Seluruh PD
			Perjanjian Kinerja	Dokumen	Jumlah Dokumen PK	49	-	-	-	48		Bagian Organisasi	Seluruh PD

Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target penyelesaian					Jumlah anggaran	Unit/satuan kerja	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	pelaksana
			Pengukuran Kinerja	Dokumen	Jumlah Dokumen	1	-	-	-	1		Bagian Organisasi	Seluruh PD
			Pelaporan Kinerja	Dokumen	Jumlah Dokumen	1	-	-	-	1		Bagian Organisasi	Seluruh PD
			Evaluasi Internal AKIP	Dokumen	Jumlah Dokumen	49	-	-	-	48		Bagian Organisasi	Seluruh PD
			Implementasi e-Sakip Kabupaten Pringsewu	Aplikasi	% penerapan Aplikasi	100	-	-	-	100		Bagian Organisasi	Seluruh PD
	Indeks Kualitas Perencanaan	69.00	Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Perencanaan	Dokumen	Dokumen IKP				1	1		Bappeda	Seluruh PD
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Predikat Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM)	WBK	Penyusunan SK Tim Zona Integritas Kabupaten	Dokumen	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Tim Zona Integritas	1				1		Inspektorat	Disdukcapil DPMPSTSP
			Pelaksanaan Survey Mandiri SPAK dan SPKP	Dokumen	Laporan Hasil Survey Mandiri SPAK dan SPKP		1			1		Inspektorat	Disdukcapil DPMPSTSP
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas oleh Tim TPI	Dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi		1			1		Inspektorat	Disdukcapil DPMPSTSP



Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target penyelesaian					Jumlah anggaran	Unit/satuan kerja	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	pelaksana
			Pengusulan Zona Integritas Kemenpan RB	Dokumen	Surat usulan Zona Integritas		1			1		Inspektorat	Disdukcapil DPMPSTP
			Evaluasi dan Penilaian Zona Integritas oleh TPN	Dokumen	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK				WB K	WBK		Inspektorat	Disdukcapil DPMPSTP
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Skor/Level SPIP	3	Penyusunan SK Tim Asesor SPIP	Dokumen SK	Jumlah Dokumen SK Tim Asesor SPIP				1	1		Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
			Monitoring Evaluasi SPIP Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah laporan Kegiatan SPIP				1	1		Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
			Sosialisasi Pelaksanaan SPIP Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Laporan Kegiatan				1	1		Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
			Penilaian SPIP oleh BPKP Lampung	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penilaian				1	1		Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	25	Monitoring dan Evaluasi SP4N LAPOR Perangkat Daerah	Laporan	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat yang telah terselesaikan	1	1	1		3		Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target penyelesaian					Jumlah anggaran	Unit/satuan kerja	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	pelaksana
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas	75.80	Penyusunan SK Tim SPI Kabupaten Pringsewu	Dokumen	SK Sekretaris Daerah				1	1		Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
			Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan SPI oleh KPK RI	Laporan	Laporan Hasil Rapat	1	1			2		Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
			Pelaksanaan SPI oleh KPK RI	Dokumen	Hasil Laporan SPI	1	1			2		Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	53.00	Penyusunan SK Tim Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pringsewu	Dokumen	SK Tim Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pringsewu			1		1		Bagian Hukum	Bagian Hukum
			Penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	1			2 per da 7 Per bup	9		Bagian Hukum	Bagian Hukum
			Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Orang	Terlaksananya diklat peraturan perundang-undangan			1		1		Bagian Hukum	Bagian Hukum

Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target penyelesaian					Jumlah anggaran	Unit/satuan kerja	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	pelaksana
Pelaksanaan Arsip Digital	tingkat kualitas pengelolaan arsip digital	43.55	Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun.	Arsip Inaktif	Jumlah arsip terselamatkan				150	150		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Pengelolaan arsip statis (Akuisisi Arsip perangkat daerah)	Arsip Statis	Jumlah arsip terselamatkan			30		30		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Implementasi Aplikasi SRIKANDI	Dokumen	Jumlah SK Tim Aplikasi SRIKANDI			1		1		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh PD
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	64.08	Penyusunan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 027/04/U.07/2023 tentang Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2023	Dokumen	Jumlah Dokumen Surat Edaran Sekretaris Daerah	1				1	APBD Kab Pringsewu TA 2023	Bagian PBJ	Seluruh PD

Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target penyelesaian					Jumlah anggaran	Unit/satuan kerja		
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	pelaksana	
			Penyusunan Surat Edaran Bupati Pringsewu No. 027/103/U.07/2023 tentang Pemanfaatan Katalog Elektronik (E-katalog) dan Toko Daring pada Pengadaan barang dan Jasa	Dokumen	Jumlah Dokumen Surat Edaran Bupati	1					1	APBD Kab Pringsewu TA 2023	Bagian PBJ	Seluruh Perangkat Daerah
			Penyusunan Laporan Pengadaan barang dan Jasa, LPSE, Pembinaan & Advokasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan	9	9	9	9	36			Bagian PBJ	Bagian PBJ
			Penyusunan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 027/04/U.07/2023 tentang Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Surat Edaran Sekretaris Daerah	1					1	APBD Kab Pringsewu TA 2023	Bagian PBJ	Seluruh PD

Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target penyelesaian					Jumlah anggaran	Unit/satuan kerja	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	pelaksana
			Kabupaten Pringsewu T.A 2023										
Penguatan Sistem Merit	Nilai Sistem merit	128	Penyusunan Perbup tentang pola karir;	Dokumen	Jumlah Dokumen Perbup pola karir	-	-	1		1		BKPSDM, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum	Seluruh PD
			Penyusunan Perbup tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool, rencana suksesi;	Dokumen	Jumlah Dokumen Perbup	-	-		1	1		BKPSDM, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum	Seluruh PD
			Penyusunan Perbup tentang Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, Teknis, social, kultural) untuk setiap jabatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Perbup	-	-	-	1	1		BKPSDM, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum	Seluruh PD
			Penyusunan Perbup tentang Pedoman Manajemen Talenta Pns	Dokumen	Jumlah Dokumen Perbup	-	-		1	1		BKPSDM, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum	Seluruh PD

Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target penyelesaian					Jumlah anggaran	Unit/satuan kerja	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	pelaksana
			Penyusunan Perbup tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator Dan Pengawas	Dokumen	Jumlah Dokumen Perbup	-	-		1	1		BKPSDM, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum	Seluruh PD
			Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi;	Dokumen	Jumlah Dokumen	-	-	-		1		BKPSDM, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum	Seluruh PD
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	65.00	Melakukan monitoring terhadap pengisian Core Values	Laporan	Laporan secara langsung kepada atasan terkait pengisian core value BerAKHLAK				4	4	-	Bagian Organisasi	Seluruh ASN di lingkungan Pemda Pringsewu
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	78.00	pelaksanaan evaluasi terhadap penilaian pada tahun sebelumnya	Dokumen	Laporan penilaian standar pelayanan publik tahun 2021	1				1		Bagian Organisasi	Seluruh perangkat Daerah
			koordinasi dan konsultasi ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung	Laporan	Laporan koordinasi dan konsultasi	1				1		Bagian Organisasi	Seluruh perangkat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target penyelesaian					Jumlah anggaran	Unit/satuan kerja	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	pelaksana
			asistensi penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022	Laporan	Laporan hasil asistensi	1				1		Bagian Organisasi	Seluruh perangkat Daerah
			pembinaan kepada perangkat daerah yang akan dinilai pada tahun 2022	Jumlah	Perangkat daerah yang di bina		20			20		Bagian Organisasi	Seluruh perangkat Daerah
			koordinasi dengan Perangkat Daerah yang akan dinilai pada tahun 2022	Laporan	Laporan hasil koordinasi		1			1		Bagian Organisasi	Seluruh perangkat Daerah
			rapat internal dengan Perangkat Daerah yang akan dinilai	Laporan	Laporan hasil rapat		1			1		Bagian Organisasi	Seluruh perangkat Daerah
			laporan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022	Laporan	Laporan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik				7	7		Bagian Organisasi	Seluruh perangkat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target penyelesaian					Jumlah anggaran	Unit/satuan kerja	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	pelaksana
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	89.4	Melakukan pendampingan bersama tim survey ke lapangan	Laporan	Laporan secara langsung kepada atasan terkait hasil pemantauan di lapangan			1		1		Bappeda dan Bagian Organisasi	Disdukcapil, RSUD Pringsewu dan DPMPSTP
			Membuat laporan kompilasi SKM 2023										
	Indeks Pelayanan Publik	3.51	Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun sebelumnya	Laporan	Laporan indeks pelayanan publik tahun 2022	1				1		Bagian Organisasi	Disdukcapil, DPMPSTP, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Puskesmas
			Asistensi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)	Laporan	Laporan hasil asistensi kepada atasan		1			1		Bagian Organisasi	Disdukcapil, DPMPSTP, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Puskesmas



Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target penyelesaian					Jumlah anggaran	Unit/satuan kerja	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	pelaksana
			Mendampingi tim evaluator Provinsi Lampung dalam melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah	Laporan	perangkat daerah yang dibina			5		5		Bagian Organisasi	Disdukcapil, DPMPSTP, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Puskesmas
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai SAP	Opini	Opini BPK		WTP				APBD Kab. Pringsewu	BPKAD	Seluruh perangkat Daerah

### RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit satuan kerja pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	
<b>PENGENTASAN KEMISKINAN</b>																
Beban Pengeluaran masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang masih tinggi	Meningkatnya layanan Pendidikan Kesetaraan yang merata, terjangkau dan bermutu serta Pendidikan Masyarakat	- Angka kelulusan Pendidikan Kesetaraan - Angka Putus Sekolah	-100% - 0,75%	Pengelolaan pendidikan non formal atau kesetaraan yang mendapatkan BOP Kesetaraan operasional anak putus sekolah bantuan melalui PKBM	Peserta	Jumlah Peserta didik pada Lembaga Pendidikan Kesetaraan yang diberikan biaya peserta didik non formal/ kesetaraan					911 Peserta didik pada 10 Lembaga Pendidikan Kesetaraan	911 Peserta didik pada 10 Lembaga Pendidikan Kesetaraan	Terkait		Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Beban Pengeluaran masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang masih tinggi	Meningkatnya pengelolaan pelayanan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat	Presentase IKM terhadap layanan Puskesmas dan RS	73,4%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Ibu Hamil dan Balita	Jumlah ibu hamil KEK dan balita gizi kurang			398 ibu hamil KEK, 926 balita gizi kurang	174 ibu hamil KEK	572 ibu hamil KEK dan 926 balita gizi kurang	Terkait		Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
Beban Pengeluaran masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang masih tinggi	Meningkatnya pengelolaan pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Presentase IKM terhadap layanan Puskesmas dan RS	73,4%	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	Terkait		Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
Beban Pengeluaran masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang masih tinggi	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	66 orang	Penyaluran bantuan rehabilitasi sosial kebutuhan dasar pangan dan nutrisi bagi Lanjut Usia Telantar, Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar	orang	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan rehabilitasi sosial kebutuhan dasar pangan dan nutrisi			1). 22 Orang Lanjut Usia terlantar 2). 22 Orang Penyandang Disabilitas Terlantar 3). 22 Orang Anak Terlantar		66 Orang	Terkait		Dinas Sosial	Dinas Sosial
Beban Pengeluaran masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang masih tinggi	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	11	Penyaluran bantuan rehabilitasi sosial alat bantu bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Telantar.	Orang	Jumlah orang yang menerima alat bantu dan Alat Bantu Peraga			1). 6 Orang Lanjut Usia Terlantar 2). 5 Orang Penyandang Disabilitas		11 Orang	Terkait		Dinas Sosial	Dinas Sosial
Beban Pengeluaran masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang masih tinggi	Terlaksananya pelatihan dan pemberian bantuan sosial alat bantu bagi penyandang disabilitas.	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan Kabupaten /Kota	10 peserta	Pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas.	Orang	Jumlah peserta yang mendapatkan Pelatihan keterampilan			10 peserta penyandang disabilitas terlantar		10 peserta penyandang disabilitas terlantar	Terkait		Dinas Sosial	Dinas Sosial

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
Beban Pengeluaran masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang masih tinggi	Terlaksananya Pendampingan dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	80 orang	Monitoring dan evaluasi bagi Orang Miskin dan rentan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama	Orang	Jumlah orang miskin dan rentan yang tergabung dalam Kelompok usaha bersama yang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				80 orang miskin dan rentan yang tergabung dalam Kelompok usaha bersama	80 orang miskin dan rentan yang tergabung dalam Kelompok usaha bersama	Terkait		Dinas Sosial	Dinas Sosial
Beban Pengeluaran masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang masih tinggi	Terwujudnya perlindungan dan jaminan sosial bagi Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase warga miskin cakupan Kabupaten/ Kota Dalam DTKS yang belum menerima perlindungan dan jaminan sosial	72,5%	Penyaluran bantuan sosial, pendampingan, dan monitoring bansos RTLH bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).	Orang/keuarga	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota		106 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)			106 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Terkait		Dinas Sosial	Dinas Sosial
Beban Pengeluaran masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang masih tinggi	Meningkatnya pemberdayaan kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Prosentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	70%	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K, Lansia, Ibu Hamil dan anak	Pekon	Jumlah Pekon yang mendapatkan Pelatihan, Sosialisasi dan Bantuan Sembak, dan Makanan Tambahan				126 Pekon	126 Pekon	Terkait		Dinas PMP	Dinas PMP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				Stunting)											
Beban Pengeluaran masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang masih tinggi	Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Jumlah pasar yang dipantau ketersediaan dan harga kebutuhan pokok	7 Pasar	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	Laporan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas Kabupaten	9 laporan/Kecamatan				9 laporan/Kecamatan	Terkait		Dinas Koperindag	Dinas Koperindag
Beban Pengeluaran masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang masih tinggi	Meningkatnya penanggulangan bencana untuk (Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatkan Penanganan Pemulihan Pasca Bencana)	Rasio desa tangguh bencana	16.5%	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Paket	Jumlah paket bantuan yang terkenaputi beliung dan kebakaran				1 paket	1 Paket	Terkait		BPBD	BPBD
Beban Pengeluaran masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang masih tinggi	Meningkatnya pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	75%	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (spiritualmasyarakat, guru ngaji, rumah ibadah)	Kecamatan	Jumlah kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan bina mental				9 Kecamatan	9 Kecamatan	Terkait		Bagian Kesra	Bagian Kesra

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
Pendapatan masyarakat yang rendah	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Jumlah Lumbung Pangan Yang Terisi	5 unit	Penyediaan pengisian Lumbung Pangan	Kelompok	Jumlah kelompok yang menerima bantuan pengisian lumbung pangan			5 Kelompok		5 Kelompok	Terkait		Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
Pendapatan masyarakat yang rendah	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan	1 Dokumen	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan	Kelompok	Jumlah kelompok yang menerima bantuan paket ikan air tawar di daerah lokasi fokus kemiskinan ekstrem, daerah rentan pangan, dan stunting			2 Kelompok		2 Kelompok	Terkait		Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
Pendapatan masyarakat yang rendah	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah Kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	5 Poklasar	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Poklasar	Jumlah Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil			5 Poklasar		5 Poklasar	Terkait		Dinsa Perikanan	Dinsa Perikanan
Pendapatan masyarakat yang rendah	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Jumlah lapran pengembangan Sarana Pertanian	3 laporan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	Pupuk, Pestisida, dan Mesin Perajang Tembakau	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				3 laporan	3 laporan	Terkait		Dinas Pertanian	Dinas Pertanian

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				Teknologi dan Spesifik Lokasi		Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi									
Pendapatan masyarakat yang rendah	Meningkatnya penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	6 laporan	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	Jumlah dokumen hasil peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 dokumen	1 dokumen	Terkait		Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
Pendapatan masyarakat yang rendah	Meningkatnya pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	60 Peserta	Peningkatan kapasitas SDM	Orang	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi				60 orang	60 orang	Terkait		Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
Pendapatan masyarakat yang rendah	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Jumlah pekon yang mendapatkan pelatihan dan bantuan	131 Desa	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pekon	Jumlah Pekon yang mendapatkan pelatihan dan bantuan				131 Desa	131 desa	Terkait		Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
Pendapatan masyarakat yang rendah	Meningkatnya pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan	Jumlah Kelompok ekonomi perempuan yang mendapatkan pelatihan	5 Kelompok	Pelatihan manajemen SDM dan bantuan Sembako	Kelompok	Jumlah kelompok ekonomi perempuan yang mendapatkan pelatihan dan bantuan sembako					5 Kelompok	Terkait	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB	
Pendapatan masyarakat yang rendah	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Kelompok	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kelompok Wanita Tani (KWT)	Jumlah KWT yang mendapatkan bantuan dan pendampingan penanganan Kemiskinan Ekstrem, Daerah Rentan Pangan, dan Stunting				2 KWT	2 KWT	Terkait	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	
Pendapatan masyarakat yang rendah	Meningkatnya perencanaan dan pembangunan industri	Cakupan IKM yang mendapatkan pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan sarana dan Prasaran	9 Kecamatan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Orang	Jumlah pelaku IKM yang mendapatkan pelatihan				50 orang pelaku IKM	50 orang pelaku IKM	Terkait	Dinas Koperindag	Dinas Koperindag	



Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
Pendapatan masyarakat yang rendah	Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah sarana pembudidayaan ikan	50 unit	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	Kelompok	Jumlah Pokdakan yang menerima bantuan Sarana Pembudidayaan ikan			50 Kelompok pembudidayaan ikan		50 Kelompok pembudidayaan ikan	Terkait		Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
Pendapatan masyarakat yang rendah	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase Peningkatan Pasca Panen Perikanan	4,73 %	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok Penerima Bantuan Badan Hukum	Jumlah Kelompok yang menerima bantuan jasa pembuatan akta notaris badan hukum kelompok perikanan				7 Kelompok Penerima Bantuan Badan Hukum	7 Kelompok Penerima Bantuan Badan Hukum	Terkait		Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
Pendapatan masyarakat yang rendah	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase Peningkatan Pasca Panen Perikanan	4,73 %	Pelaksanaan Bimbingan/pelatihan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Unit usaha	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	Terkait		Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
Pendapatan masyarakat yang rendah	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase Peningkatan Pasca Panen Perikanan	4,73 %	Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	Paket	Jumlah Paket bantuan Kegiatan GEMARIKAN dan PMTAS (Pemberian				300 Paket	300 Paket	Terkait		Dinas Perikanan	Dinas Perikanan

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit satuan kerja pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	
						Makanan Tambahan Anak Sekolah)										
Pendapatan masyarakat yang rendah	Meningkatnya pendidikan dan latihan perkoperasian (Pelaku Usaha Koperasi)	Persentase Pelaku Pekoperasian	100%	Pelaksanaan Pelatihan Koperasi dan Pelatihan UMKM	Orang	Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang mengikuti pelatihan			100		100	Terkait		Dinas Koperindag	Dinas Koperindag	
Pendapatan masyarakat yang rendah	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	30%	Sosialisasi / penyuluhan perkoperasian kepada kelompok masyarakat/kelompok UMKM yang akan mendirikan badan hukum Koperasi	Kelompok masyarakat/kelompok UMKM Kab.Pringsewu	Jumlah kelompok masyarakat/UMKM yang mengikuti sosialisasi perkoperasian				8 Kelompok masyarakat/kelompok UMKM	8 Kelompok masyarakat/kelompok UMKM	Terkait		Dinas Koperindag	Dinas Koperindag	
Pendapatan masyarakat yang rendah	Meningkatnya pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang masuk klasifikasi UKM	30%	Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Pelaku UMKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan			25 Pelaku UMKM		25 Pelaku UMKM	Terkait		Dinas Koperindag	Dinas Koperindag	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
Pendapatan masyarakat yang rendah	Terfasilitasinya lembaga pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Prosentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	70%	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Pelatihan dan Sosialisasi))	Peserta	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas Pokja Posyandu Kecamatan				130 Peserta	130 Peserta	Terkait		Dinas PMP	Dinas PMP
Pendapatan masyarakat yang rendah	Terfasilitasinya lembaga pemberdayaan lembaga badan usaha	Prosentase lembaga badan usaha yang aktif	70%	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pelatihan/pembinaan)	Pelaku Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM)	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) yang mendapatkan Pelatihan dan Pembinaan				320 Pelaku Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM)	320 Pelaku Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM)	Terkait		Dinas PMP	Dinas PMP
Pendapatan masyarakat yang rendah	Terlaksananya administrasi pemerintahan desa	Prosentase pekon berkinerja baik (pekon maju ke mandiri)	84%	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	BUMDes (Kategori Dasar dan Kategori Berkembang)	Jumlah BUMDes menerima Pelatihan dan Sosialisasi				30 BUMDes	30 BUMDes	Terkait		Dinas PMP	Dinas PMP
Pendapatan masyarakat yang rendah	Meningkatnya perencanaan dan pembangunan industri	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan sarana dan Prasaran	9 Kecamatan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kelompok	Jumlah kelompok penerima bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				4 Kelompok	4 Kelompok	Terkait		Dinas Koperindag	Dinas Koperindag

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
Pendapatan masyarakat yang rendah	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah peningkatan kunjungan wisatawan	40.000 Orang	Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Organisasi	Jumlah Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar menerima bantuan dalam pengelolaan destinasi pariwisata				2 Organisasi	2 Organisasi	Terkait		Dinas Pemuda Olahraga	Dinas Pemuda Olahraga
Pendapatan masyarakat yang rendah	Meningkatnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	700 Orang	Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Paket	Jumlah paket lomba masak, gemarikan, Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah, dan stunting			300 Paket		300 Paket	Terkait		Dinas Pemuda Olahraga	Dinas Pemuda Olahraga
Wilayah daerah kemiskinan yang bertambah	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	100%	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Mengatasi Luapan Air atau Banjir di Areal Persawahan	Km	Jumlah Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun				1 Km	1 Km	Terkait		Dinas PU	Dinas PU

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
Wilayah daerah kemiskinan yang bertambah	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	100%	Jaringan irigasi permukaan untuk Pemenuhan Kebutuhan Air di Areal Persawahan	Km	Jumlah panjang jaringan irigasi permukaan yang ditngkatkan	1 Km	1 Km			2 Km	Terkait		Dinas PU	Dinas PU
Wilayah daerah kemiskinan yang bertambah	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Jumlah panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi			0,5 Km	0,5 Km	1 Km	Terkait		Dinas PU	Dinas PU
Wilayah daerah kemiskinan yang bertambah	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	100%	Rehabilitasi Bendung Irigasi untuk Mengatasi Luapan Air/Banjir di Areal Persawahan dan Permukiman serta Untuk Pemenuhan Kebutuhan Air di Areal Persawahan	Bendungan	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi			1 Bendungan	1 Bendungan	2 Bendungan	Terkait		Dinas PU	Dinas PU
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	100%	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Mengatasi Luapan Air atau Banjir di Areal Persawahan dan Permukiman, untuk Pemenuhan	Km	Jumlah panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	14 Km	21 Km	20 Km	16 Km	71 Km	Terkait		Dinas PU	Dinas PU

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				Kebutuhan Air di Areal Persawahan dan untuk Perawatan Jaringan Irigasi)											
Wilayah daerah kemiskinan yang bertambah	Meningkatnya Ketersediaan Rumah tangga yang memiliki akses air minum	Prosentase Penduduk Berakses Air Minum	100%	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pekon	Jumlah Pekon yang menerima bantuan pembangunan sumur bor				2 Pekon	2 Pekon	Terkait		Dinas PU	Dinas PU
	Meningkatnya pengembangan system dan pengelolaan persampahan	Prosentase Penanganan Sampah	100%	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Unit	Jumlah pembangunan TPS3R				1 Unit	1 Unit	Terkait		Dinas PU	Dinas PU
	Meningkatnya Pengelolaan Saluran Drainase Lingkungan Pemukiman dalam Kondisi Baik dan Berfungsi	Prosentase Drainase Lingkungan Perkotaan dalam kondisi baik (tidak tersumbat	100%	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Unit	Jumlah pembangunan drainase/taud Perkotaan yang direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	Terkait		Dinas PU	Dinas PU
	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Prosentase Drainase Lingkungan Perkotaan dalam kondisi baik (tidak tersumbat	100%	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Unit	Jumlah pembangunan drainase lingkungan yang direhabilitasi				4 unit	4 unit	Terkait		Dinas PU	Dinas PU

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
	Meningkatnya Kualitas Pengembangan dan Penyehatan Lingkungan Pemukima	Prosentase konektivitas wilayah strategis dan cepat tumbuh	100%	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Ruas Jalan	Jumlah pembangunan jalan lingkungan pada 63 ruas				63 Ruas Jalan	63 Ruas Jalan	Terkait		Dinas PU	Dinas PU
	Meningkatnya penyelenggaraan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Panjang Jalan yang dipelihara/ direhabilitasi/ direkonstruksi	0,7 Km	Pembangunan Jalan	Ruas Jalan	Jumlah panjang jalan yang dibangun				0.7 Km	0.7 Km	Terkait		Dinas PU	Dinas PU
	Meningkatnya penyelenggaraan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Panjang Jalan yang dipelihara/ direhabilitasi/ direkonstruksi	7 Km	Rekonstruksi Jalan	Ruas Jalan	Jumlah panjang jalan yang direkonstruksi			1.5 Km	5.5 Km	7 Km	Terkait		Dinas PU	Dinas PU
	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakata, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Prosentase lembaga kemasyarakata n yang aktif	70%	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	2 Pekon	Jumlah Pekon/Desa tempat Pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD)				2 Peko n	2 Pekon	Terkait		Dinas PMP	Dinas PMP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Jumlah pembangunan sarana pertanian	1 unit	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (Kelompok Tani/Gapoktan/GP3A/P3A)	Unit	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				1 unit	1 unit	Terkait		Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
	Meningkatnya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah pembangunan, jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	2 unit	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Kelompok Tani/Gapoktan/GP3A/P3A)	Unit	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				2 unit	2 unit	Terkait		Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
	Meningkatnya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 unit	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air (Kelompok Tani/Gapoktan/GP3A/P3A)	Unit	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 unit	3 unit	Terkait		Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
<b>PENINGKATAN INVESTASI</b>															
Lamanya proses perizinan berusaha	Meningkatnya proses pengurusan izin dan non izin	Rata rata lama waktu pengurusan izin dan non izin	30 menit	Penyederhanaan SOP	Dokumen	Jumlah SOP yang disederhanakan	-	-	1	1	2	Terkait		DPMPTSP	Seluruh PD



Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				Mengadakan pelatihan pelayanan bagi ASN	Orang	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan pelayanan	50	-	-	-	50	Terkait		DPMPTSP	Seluruh PD
Bergesernya minat investor ke Daerah lain	meningkatkan minat investasi di Daerah	Jumlah Investor berskala Nasional	30 Investor	Penyusunan Peraturan/Regulasi terkait pemberian fasilitas/ insentif kepada pelaku usaha/ Kemudahan berusaha	Produk Hukum	Jumlah Peraturan/Regulasi terkait pemberian fasilitas/ insentif kepada pelaku usaha	-	-	-	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	Terkait		DPMPTSP	Seluruh PD
Realisasi Investasi kurang maksimal	Meningkatnya capaian realisasi investasi daerah	Nilai Investasi Daerah	450 Milyar	Mengikuti even/ pameran penanaman modal tingkat Nasional	Rupiah	Jumlah Realisasi Investasi	50 Mil yar	125 Mil yar	125 Mil yar	150 Mil yar	30 Mil yar	Terkait		DPMPTSP	Seluruh PD
				Mengikuti pelatihan penanaman Modal bagi ASN	Orang	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan penanaman Modal	-	3 Orang	-	-	-	Tidak terkait		DPMPTSP	Seluruh PD

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
<b>DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAH (PENANGANAN STUNTING)</b>															
Rendahnya capaian - keterbukaan informasi Badan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Persentase pelaksanaan keterbukaan informasi bagi badan publik	100%	Kegiatan Pembuatan aplikasi simonster	Aplikasi	Jumlah Aplikasi Data penanganan Stunting				1	1	Tidak Terkait	-	P3AP2KB,	Seluruh OPD
				Rapat Koordinasi dan sinkronisasi data	Perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam penginputan data					9	Tidak Terkait	-	Bappeda	Dinas P3AP2KB, Dinkes, Dinsos, PU PR, DKP, Distan, Dinas Perikanan, Dinas PMP, Diskominfo
<b>PERCEPATAN PRIORITAS AKTUAL PRESIDEN (PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (PDN))</b>															
Masing terdapat perangkat daerah yang belum menggunakan e-KATALOG lokal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Meningkatnya Penggunaan Produk dalam negeri	Jumlah Pengguna Produk dalam negeri yang tayang dalam e-KATALOG	8.000 produk	Surat Edaran tentang Penggunaan e KATALOG Lokal dalam belanja APBD	Dokumen	Jumlah Surat edaran Bupati	1				1	Terkait	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh PD

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
Belum optimalnya UMKM yang menjadi penyedia melalui E catalog lokal	Meningkatnya UMKM yang telah menerima Informasi	Jumlah UMKM yang terdaftar dalam E Catalog	20 UMKM	Penyampaian Informasi (Surat Edaran/Himbauan)	Usaha	Jumlah UMKM yang mendapatkan informasi melalui e catalog			10 UMKM	10 UMKM	20 UMKM	Terkait		Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	teluruh PD

**PERCEPATAN PRIORITAS AKTUAL PRESIDEN (PENGENDALIAN INFLASI)**

Nilai Inflasi perlu diturunkan	Menurunnya tingkat Inflasi daerah	Tingkat Inflasi (YoY)	Penurunan target pengendalian inflasi menjadi sebesar 3.0%	Menyelenggarakan Operasi Pasar menjelang Bulan puasa, hari raya idul fitri, Natal, tahun baru dan liburan sekolah	Penyelenggaraan Operasi Pasar	Jumlah Operasi Pasar	Nilai Inflasi perlu diturunkan	Menurunnya tingkat Inflasi daerah	Tingkat Inflasi (YoY)	Penurunan target pengendalian inflasi menjadi sebesar 3.0%	Menyelenggarakan Operasi Pasar menjelang Bulan puasa, hari raya idul fitri, Natal, tahun baru dan liburan sekolah	Penyelenggaraan Operasi Pasar	Jumlah Operasi Pasar	Nilai Inflasi perlu diturunkan	Menurunnya tingkat inflasi daerah
				Penetapan harga jual maksimum	Penetapan harga jual maksimum	Penetapan harga jual maksimum					Penetapan harga jual maksimum	Penetapan harga jual maksimum	Penetapan harga jual maksimum		

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit satuan kerja pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	
				Membatasi barang impor yang mengalami inflasi	Penetapan batasan pembelian barang impor yang mengalami inflasi	Penetapan batasan pembelian barang impor yang mengalami inflasi						Membatasi barang impor yang mengalami inflasi	Penetapan batasan pembelian barang impor yang mengalami inflasi	Penetapan batasan pembelian barang impor yang mengalami inflasi		

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

Dto

MARINDO KURNIAWAN